

# ANALISIS WACANA KRITIS DALAM PERSPEKTIF NORMAN FAIRCLOUGH

*Elya Munfarida*

Peserta Program Doktor ICRS UGM Yogyakarta

**Abstract:** Discourse analysis has been a study that attracts many intellectuals of various disciplines to discuss about, generating the emergence of theories of their own perspectives. Many criticisms for the theories also show that intellectuals are more interested in this field leading to make discourse analysis as a multidisciplinary study. Based on this ground, Norman Fairclough seeks to reconstruct discourse theory as a criticism to the existing theories, which tends to be side-emphasis and partial on the basis of their own discipline. Combining three traditions, i.e. linguistic, interpretative, and sociological traditions, he offers a discourse model integrating three dimensions: text, discourse practice, and social practice. Each dimension has its area, process, and analysis model, in which all of them dialectically connect to one another. In addition, Fairclough also formulates another important concept, namely intertextuality, which affirms the interrelation of various texts and discourses to a text. This concept will also create ideological effect of structuration and restructuring of the prevalent discourse order. When power and ideology embed in a discourse, intertextuality will function as a mechanism for maintaining and changing the domination relation.

**Keywords:** discourse, intertext, ideology.

**Abstrak:** Studi tentang wacana menjadi kajian yang banyak didiskusikan oleh para intelektual dalam berbagai bidang yang kemudian melahirkan beragam teori sesuai dengan perspektif masing-masing. Berbagai kritik terhadap teori-teori yang ada semakin menegaskan meningkatnya minat para intelektual yang justru berperan mengembangkan kajian wacana menjadi kajian multidisipliner. Dalam konteks ini, Norman Fairclough juga berupaya merekonstruksi teori wacana sebagai kritik terhadap teori yang ada yang cenderung timpang dan parsial berdasar pada disiplin masing-masing. Dengan meramu tiga tradisi, yakni linguistik, tradisi interpretatif dan sosiologi, Fairclough menawarkan model diskursus yang memuat tiga dimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Masing-masing dimensi ini memiliki wilayah, proses dan model analisis masing-masing dan ketiganya berhubungan secara dialektis. Di samping itu, Fairclough juga memformulasikan konsep penting lainnya, yakni intertekstualitas yang mengafirmasi interrelasi berbagai teks dan diskursus dalam sebuah teks. Konsep ini juga akan menghasilkan efek ideologis berupa strukturasi dan restrukturasi tatanan diskursus yang ada. Ketika kekuasaan dan ideologi melekat dalam diskursus, maka intertekstualitas bertindak sebagai mekanisme untuk menjaga atau mengubah relasi dominasi.

**Kata Kunci:** Wacana/diskursus, Intertekstualitas, Ideologi, Hegemoni.

## PENDAHULUAN

Kajian tentang wacana belakangan menjadi populer di kalangan intelektual lintas disiplin ilmu, baik dalam keilmuan linguistik, sosiologi, psikologi, kajian budaya, dan lain-lain. Diinisiasi dari kajian linguistik, perkembangan wacana lintas disiplin ini pada gilirannya menghasilkan beragam konsep dan pemaknaan terhadap wacana tersebut karena adanya perspektif yang berbeda dari masing-masing disiplin tersebut. Bahkan, sejalan dengan perkembangan keilmuan yang berubah secara dinamis, konsepsi wacana dalam satu disiplin ilmu juga berkembang dan beragam. Kelemahan dari konsepsi wacana yang dikembangkan oleh pemikir sebelumnya dikritik dan direkonstruksi oleh pemikir lainnya. Ini mengakibatkan konseptualisasi wacana tidak pernah berakhir.

Perkembangan dan rekonstruksi konsep wacana ini misalnya dicontohkan dengan Michel Foucault, yang pada awalnya dimotivasi oleh kegelisahan terhadap pereduksian makna wacana (diskursus).<sup>1</sup> Berbasis pada kritiknya terhadap strukturalisme Ferdinand de Saussure yang menganggap bahasa sebagai sistem produksi makna yang secara ketat terdiri atas petanda (*signified*) dan penanda (*signifier*), Foucault sebaliknya justru menegaskan bahwa bahasa (wacana) merupakan sistem produksi makna yang menyediakan individu-individu cara melihat, berpikir, dan berperilaku. Dalam pengertian ini, praktik diskursif dari individu dipandang sebagai efek dari wacana yang pada dasarnya sangat terkait dengan relasi kuasa.

Konsepsi Foucault ini di satu sisi memberikan kontribusi penting dalam pergeseran paradigma bahasa dari strukturalisme ke post-strukturalisme, namun di sisi lain pemikirannya yang meradikalisasi diskursus, kekuasaan, sejarah, subjek, rasio, dan lain-lain menuai banyak kritik yang menganggapnya sebagai anti perubahan sosial, pro-relativisme, anti epistemologi, anti subjek, irasional, tradisional (alih-alih postmodern), dan lain sebagainya. Jurgen Habermas, misalnya, menganggap posisi Foucault berpijak pada perspektif tradisional bukannya postmodern, terkait dengan kritiknya terhadap modernitas yang kehilangan '*normative notion*' yang menjadi landasan untuk mengkritiknya. Secara umum, Habermas menyebut Foucault sebagai pendukung '*presentism, relativism, dan kryptonormativism*' sebagai akibat atas destruksinya terhadap 'kebenaran (*truth*)' dan penolakannya terhadap rasio melalui rasio itu sendiri.<sup>2</sup>

Kritik senada juga dilontarkan oleh Norman Fairclough terkait dengan kecenderungan anti perubahan sosial dan anti subjek yang melekat dalam konsepsi wacana Foucault. Di satu sisi, Fairclough mengapresiasi beberapa pemikiran Foucault terutama terkait dengan relasi kuasa yang inheren

dalam wacana, namun di sisi lain dia mengkritik makna konstitutif wacana yang justru menutup ruang transformasi sosial. Dengan memanfaatkan teori-teori lain terutama dari Antonio Gramsci dan Louis Althusser, Fairclough berusaha membuktikan adanya potensi transformasi sosial dalam diskursus. Di samping itu, berbasis pada keilmuan linguistiknya, Fairclough berupaya mengkombinasikan teori sosial (wacana) dengan linguistik yang kemudian melahirkan linguistik kritis. Kombinasi ini pada gilirannya sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana relasi kuasa di balik teks dan bagaimana kekuasaan ideologis diartikulasikan secara tekstual. Signifikansi inilah yang menjadikan elaborasi yang mendalam terkait dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough menjadi penting.

## **BASIS PARADIGMATIK ANALISIS WACANA KRITIS**

Kajian tentang bahasa mengalami perkembangan yang sangat signifikan di kalangan para ahli linguistik. Strukturalisme Saussurian membuka jalan baru dalam memandang bahasa sebagai entitas yang fleksibel dan bisa berubah karena eksistensinya merupakan produk dari konvensi sosial. Pandangan ini mendorong munculnya pos-strukturalisme yang mengkritik kecenderungan strukturalisme yang dalam tataran tertentu masih melihat bahasa sebagai sebuah sistem yang eksklusif dan statis karena lebih fokus pada aspek formal. Menurut Stuart Hall, formalitas bahasa Saussure masih terjebak dalam “*scientific dream*” dengan mengandaikan bahasa semata-mata sebagai *rule-governed*.<sup>3</sup>

Namun di sisi lain, kalangan pos-strukturalis melihat aspek fleksibilitas dalam strukturalisme yang memandang bahasa tidak *given* tapi bisa berubah-ubah karena merupakan hasil dari konvensi sosial. Atas dasar itu, eksistensi bahasa dianggap sarat dengan motif kekuasaan dan kepentingan kelompok sosial tertentu. Oleh karenanya, bahasa tidak bersifat netral, tapi bias dan memihak ideologi dan kekuasaan tertentu. Akibatnya, realitas yang dikonstruksi oleh bahasa tidak dipandang sebagai realitas yang sebenarnya, melainkan realitas yang dikonstruksi (*the constructed reality*).

Pergeseran linguistik di atas secara paradigmatik berbasis pada konstruksionisme sosial. Stephen W. Littlejohn menyebutkan bahwa Alfred Schulz adalah tokoh yang menginisiasi konstruksionisme sosial yang didasari argumentasi bahwa dunia keseharian kita tidak secara absolut milik kita, namun hasil relasi-relasi intersubjektif.<sup>4</sup> Lebih lanjut, Kenneth Gergen, sebagaimana dikutip Littlejohn, menyebut teori konstruksi sosial sebagai gerakan konstruksionis sosial yang dibangun atas empat asumsi:

*“First, world does not exist by itself but its existence comes through human experiences represented through language. Second, categorization that language makes occurs in terms of social interaction among prevailing social groups in particular time and space. Third, the comprehended reality in certain events is definitely determined by communication convention. Therefore, our knowledge is determined so much by stability of social life. Fourth, reality is socially constructed by communication patterns.”<sup>5</sup>*

Marianne Jorgensen dan Louise Phillips juga berpandangan bahwa konstruksionisme sosial dibangun atas beberapa premis, yakni 1) pendekatan kritis terhadap pengetahuan yang *taken-for-granted*; 2) spesifikasi kultural dan historis; 3) hubungan antara pengetahuan dan proses sosial; 4) hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial.<sup>6</sup>

Premis *pertama* menegaskan bahwa pengetahuan kita tentang dunia tidak bersifat benar secara absolut, namun lebih bersifat relatif karena pengetahuan tersebut diperoleh secara sosial atau produk wacana. Premis *kedua* menekankan pada historisitas dan spesifitas eksistensi dan pengetahuan kita. Oleh karena bersifat kultural dan spesifik, maka pengetahuan dan cara kita memahami dunia bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi historis dan kulturalnya. Di sisi lain, wacana di sini dipahami sebagai tindakan sosial yang berperan dalam memproduksi dan mereproduksi dunia sosial (pengetahuan, identitas dan relasi sosial) dan pada gilirannya menciptakan atau mempertahankan pola-pola sosial tertentu. Premis *ketiga* mengasumsikan bahwa cara pandang kita terhadap dunia dibentuk dan dipelihara oleh proses-proses sosial. Kategorisasi tentang mana pengetahuan yang benar dan yang salah diperoleh melalui interaksi sosial, tidak semata-mata merupakan hasil refleksi individual. Premis *keempat* memandang adanya hubungan antara pengetahuan dengan tindakan sosial. Akibatnya, konstruksi pengetahuan sosial yang berbeda akan menghasilkan tindakan sosial yang berbeda pula.<sup>7</sup>

Teori konstruksionisme sosial di atas sangat berpengaruh secara signifikan dalam konstruksi teori analisis diskursus kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) secara umum. Hal ini bisa diidentifikasi dari lima karakter umum yang ada dalam berbagai teori CDA yang dikembangkan beberapa ahli. Kelima karakter tersebut yakni: pertama, karakter dari proses-proses dan struktur-struktur kultural dan sosial sebagian bersifat linguistik-diskursif. Karakter ini menegaskan bahwa dunia sosial yang di dalamnya terdapat berbagai proses dan struktur sosial, diproduksi melalui praktik-praktik linguistik-diskursif. Melalui produksi dan konsumsi teks, praktik-praktik diskursif bisa merealisasikan reproduksi dan transformasi sosial dan kultural. Oleh karenanya, CDA berpretensi untuk menjelaskan

dimensi linguistik diskursif dari berbagai fenomena sosial yang mencakup proses dan struktur sosial dan kulturalnya.

Karakter kedua adalah bahwa diskursus bersifat *constitutive* dan *constituted* yang berarti bahwa diskursus merupakan sebuah praktik sosial yang dapat menciptakan dunia sosial dan sekaligus eksistensinya diciptakan oleh praktik-praktik sosial yang lain. Berbeda dengan teori diskursus Laclau dan Mouffe yang hanya menekankan aspek konstitutif diskursus, CDA menganggap bahwa bahasa sebagai diskursus merupakan bentuk tindakan sosial yang menciptakan dan mengubah dunia dan juga bentuk tindakan sosial yang secara historis kultural muncul dalam hubungan yang dialektis dengan praktik-praktik sosial yang lain.<sup>8</sup>

Karakter ketiga menekankan perlunya menganalisis penggunaan bahasa secara empiris dalam konteks sosialnya. CDA sangat berkepentingan untuk melakukan analisis tekstual linguistik terhadap penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Karakter ini juga membedakan CDA dengan teori diskursus lain seperti Laclau dan Mouffe serta psikologi diskursif yang lebih *concern* pada analisis retorik dan tidak melibatkan analisis linguistik yang sistematis terhadap penggunaan bahasa secara sosial.<sup>9</sup>

Karakter keempat menegaskan fungsi ideologis dari diskursus. CDA beranggapan bahwa diskursus berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan relasi-relasi kekuatan sosial yang tidak setara di antara berbagai kelompok sosial yang ada. Dipengaruhi Foucault, CDA memandang bahwa kekuasaan menciptakan subjek dan agen. Konstitusi subjek melalui produksi pengetahuan mengandaikan dependensi subjek terhadap elemen eksternal yang bersifat sosial dan kultural dalam proses kemenjadiannya. Selain itu, CDA juga dipengaruhi tradisi Marxis dengan meminjam konsep ideologinya untuk mengartikulasikan subjugasi atau penindasan satu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial yang lain. Dengan demikian, penelitian CDA terfokus pada dua hal, yakni: praktik-praktik diskursif yang menciptakan representasi tentang dunia subjek-subjek serta relasi-relasi sosialnya, dan peran dari praktik-praktik diskursif ini untuk memaparkan dan melestarikan kepentingan politik kelompok-kelompok sosial tertentu.<sup>10</sup> Menurut Fairclough, CDA merupakan sebuah pendekatan yang berusaha untuk menganalisis secara sistematis:

*“Often opaque relationships of causality and determination between (a) discursive practices, events and texts and (b) broader social and cultural structures, relations and processes [...] how such practices, events and texts arise out of and are ideologically shaped by relations of power and struggles over power [...] how the opacity of these relationships between discourse and society is itself a factor securing power and hegemony”.*<sup>11</sup>

Karakter kelima menegaskan pentingnya penelitian yang kritis terhadap praktik-praktik diskursif. Hal ini tidak berarti bahwa CDA bersifat netral, tapi sebaliknya bias dengan berpihak pada kelompok yang tertindas. Pendekatan kritis ini berkepentingan untuk mengungkap relasi kekuasaan yang tidak setara dan sekaligus berpretensi untuk melakukan perubahan sosial demi terciptanya tatanan sosial yang lebih setara. Pandangan Fairclough tentang *'explanatory critique'* dan *'critical language awareness'* terutama diorientasikan untuk mencapai tujuan di atas, yakni menyingkap relasi kuasa demi perubahan sosial yang egaliter.<sup>12</sup>

## WACANA SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL

Fairclough mendefinisikan diskursus dengan tiga cara yang berbeda. *Pertama*, dalam pengertian yang paling abstrak, diskursus dimaknai sebagai penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. *Kedua*, diskursus diartikan sebagai sejenis bahasa yang digunakan dalam bidang tertentu, seperti diskursus politik, diskursus saintifik, dan lain-lain. *Ketiga*, dalam pengertian yang paling kongkrit, diskursus digunakan untuk menunjuk cara berbicara yang memberikan makna terhadap pengalaman-pengalaman dari perspektif tertentu, misalnya diskursus feminis, diskursus marxis, diskursus neoliberal, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Seperti halnya teori CDA lain, Fairclough juga menegaskan karakter *constitutive* dan *constituted* dari diskursus. Menurutnya, diskursus merupakan sebuah bentuk praktik sosial yang mengkonstruksikan dunia sosial, identitas dan relasi-relasi sosial. Di samping itu, eksistensi diskursus juga secara dialektik berhubungan dan dibentuk oleh struktur-struktur sosial yang lain.<sup>14</sup> Pandangan ini berbeda dengan pendapat post-strukturalis yang lebih menekankan aspek konstitutif diskursus dan mengabaikan aspek *constituted*-nya yang pada gilirannya berpengaruh secara signifikan pada pengabaian kemungkinan adanya perubahan dan transformasi sosial.

Dialektika antara struktur sosial dan diskursus atau praktik sosial ini menjadi poin yang penting dalam konstruksi analisis wacana kritisnya. Praktik sosial, menurutnya, tidak semata-mata sebagai refleksi dari realitas dan bersifat independen, namun selalu berada dalam hubungan yang dialektis dan aktif dengan realitas dan bahkan dapat mentransformasikannya. Begitu pula sebaliknya, realitas dapat mempengaruhi dan membentuk praktik sosial. Implikasinya struktur sosial sebagai bagian dari realitas juga berhubungan secara dialektis dengan diskursus atau praktik sosial. Fairclough menegaskan bahwa *"Social structures not only determines social practice, they are also a product of social practice. And more particularly,*

*social structures not only determine discourse, they are also a product of discourse”.*<sup>15</sup>

Dengan dialektika ini, maka diskursus memiliki efek terhadap bangunan struktur sosial dan sekaligus memiliki kontribusi bagi terciptanya kontinuitas sosial atau perubahan sosial. Efek ganda ini bermakna bahwa struktur sosial tertentu dapat terus mapan dan terjaga kontinuitasnya melalui penciptaan diskursus tertentu sebagai basis legitimasinya. Sebaliknya, perubahan sosial dapat terjadi ketika muncul diskursus yang mengkritik diskursus yang mapan dan sekaligus mengkritik struktur sosial yang ada.

Efek transformatif dari diskursus ini merupakan kritik atas pos-strukturalis yang cenderung lebih menekankan aspek konstitutif dari diskursus dan mengabaikan kemungkinan terjadinya perubahan sosial. Hal ini bisa dilihat misalnya, dari pemikiran Michel Foucault tentang diskursus yang melihat diskursus hanya bersifat konstitutif. Sebagaimana dikutip oleh Chris Weedon, Foucault mendefinisikan diskursus sebagai:

*“Ways of constituting knowledge, together with social practices, forms of subjectivity and power relations, which inhere in such knowledge, and the relation between them. Discourses are more than ways of thinking and producing meaning. They constitute the nature of body, unconscious and conscious mind and emotional life of the subjects, which they seek to govern. Neither the body nor thought and feelings have meanings outside their discursive articulation, but the ways in which discourse constitutes the minds and the body of individuals is always part of network of power relations, often with institutional bases”.*<sup>16</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa diskursus memproduksi pengetahuan dan praktik sosial serta relasi kekuasaan yang inheren di dalamnya. Diskursus juga membentuk subjektivitas dengan mendefinisikan tubuh, pikiran, dan kehidupan subjek. Judith Butler menyatakan bahwa kekuasaan regulatori tidak hanya bertindak terhadap subjek tapi juga berusaha membentuk subjek. Artinya, menjadi subjek regulasi bermakna disubjektivasi oleh regulasi tersebut dan sekaligus menjadi subjek yang terregulasikan.<sup>17</sup> Sistem-sistem kekuasaan pada gilirannya menciptakan subjek dengan mengatur kehidupannya melalui serangkaian pembatasan, larangan, regulasi, kontrol, atau bahkan proteksi individu terkait dengan struktur politik. Subjek-subjek ini dibentuk, didefinisikan, dan direproduksi sesuai dengan struktur tersebut.<sup>18</sup> Aturan-aturan pada gilirannya secara diskursif diciptakan, disebarkan, dan diinstitutionalisasi untuk memastikan agar subjek memenuhi dan sesuai dengan kemestian-kemestian sosial, kultural dan politik dalam kognisi dan praktik sosialnya.

Dengan menganggap diskursus sebagai praktik sosial, Fairclough secara otomatis menolak penyamaan diskursus dengan teks. Baginya, teks merupakan sebuah produk dari proses produksi teks dan bukan prosesnya

itu sendiri. Adapun diskursus bersifat lebih luas yang mencakup seluruh proses interaksi sosial di mana teks hanya menjadi salah satu bagiannya.<sup>19</sup> Dengan demikian, analisis diskursus yang ditawarkan tidak hanya terfokus pada teks saja, tapi juga mencakup konsumsi teks oleh pembaca dan sekaligus relasinya dengan kondisi sosio-kulturalnya.

Pembedaan antara teks dan diskursus, bagi Fairclough, penting untuk mendukung konsepsinya tentang diskursus sebagai praktik sosial. Dengan memandang teks hanya sebagai bagian dari diskursus, maka teks tidak dianggap otonom yang bebas dari lingkungan sosial, atau mengutip Michael Riffaterre sebagai "*self-sufficient text*".<sup>20</sup> Menurut Louis Althusser, teks justru tunduk pada determinasi lingkungan dan diintervensi secara sosial.<sup>21</sup> Oleh karena itu, Said menyatakan bahwa "*text incorporates discourses*" dalam produksinya. Ketika teks tertulis merupakan hasil dari relasi antara pengarang dan medium, eksistensinya secara otomatis disituasikan dan berada dalam ruang, waktu, dan masyarakat di mana teks tersebut muncul.<sup>22</sup>

## **STRUKTUR ANALISIS WACANA NORMAN FAIRCLOUGH**

Menurut Jorgensen dan Phillips, pendekatan Fairclough disebut sebagai analisis diskursus yang berorientasi teks yang berusaha menyatukan tiga tradisi: 1) analisis tekstual dalam bidang linguistik (termasuk grammar fungsional Michael Halliday; 2) analisis makro-sosiologis dari praktik sosial termasuk teori-teori Foucault yang tidak menyediakan metodologi analisis teks; dan 3) tradisi interpretatif mikro-sosiologis dalam disiplin ilmu sosiologi.<sup>23</sup> Dengan menyatukan ketiga tradisi, Fairclough menganggap analisis terhadap teks saja seperti yang banyak dikembangkan oleh ahli linguistik tidak cukup, karena tidak bisa mengungkap lebih jauh dan mendalam kondisi sosio-kultural yang melatarbelakangi munculnya teks. Begitu juga sebaliknya, pandangan ini juga sekaligus mengkritik para pengikut post-strukturalis yang lebih menekankan pada aspek sosio-kultural dari munculnya teks tanpa menyediakan metodologi yang memadai bagi analisis teks yang pada dasarnya merupakan representasi dan artikulasi dari pemikiran, kepentingan, dan ideologi yang dilekatkan pada teks.

Lebih lanjut, diskursus, menurut Fairclough berperan dalam konstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan makna. Oleh karenanya, diskursus memiliki tiga fungsi, yakni fungsi identitas, fungsi relasional, dan fungsi ideasional.<sup>24</sup> Fungsi identitas menegaskan peran diskursus dalam mengkonstruksi identitas sosial anggota masyarakat. Fungsi relasional terkait dengan keberadaan diskursus yang berfungsi

untuk menciptakan relasi-relasi sosial di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan identitas sosialnya. Adapun fungsi ideasional menunjuk pada peran diskursus dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keyakinan yang menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk memaknai dunia, identitas sosial, dan relasi sosial.

Dalam analisis diskursusnya, Fairclough menawarkan model tiga dimensi yang mewakili tiga domain yang harus dianalisis, yakni teks (ucapan, tulisan, *image* visual, atau kombinasi dari ketiganya), praktik diskursif yang mencakup produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosial. Dimensi pertama, yakni teks harus dianalisis melalui pendekatan linguistik yang mencakup bentuk formal seperti kosa kata, tata bahasa, dan struktur tekstual. Masing-masing bentuk formal tersebut harus dianalisis lebih lanjut dengan menarik nilai-nilai yang ada di dalamnya. Fairclough membedakan empat nilai yang terdapat dalam bentuk formal. Pertama, nilai eksperiental yang menunjuk pada jejak ideologis yang digunakan oleh produser teks dalam merepresentasikan dunia natural atau sosial. Aspek nilai eksperiental ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana perbedaan ideologis direpresentasikan dalam teks yang dituangkan dalam kata-kata.<sup>25</sup> Karena bersifat ideologis, nilai ini memiliki efek struktural berupa produksi pengetahuan dan keyakinan yang diharapkan mendapatkan penerimaan publik dan memenangkan pertarungan ideologis.

Nilai eksperiental yang terepresentasikan dalam teks dan terwujud dalam kosakata yang digunakan, dilakukan untuk mengidentifikasi relasi-relasi makna dalam teks dan tipe-tipe diskursus yang mendasarinya, dan berupaya menspesifikasikan basis-basis ideologis yang mendasarinya. Nilai eksperiental ini bisa diperoleh dengan menganalisis bentuk penggunaan kosakata tertentu yang berlebihan yang berarti preferensi produser teks terhadap aspek tertentu dari realitas, dan penggunaan skema klasifikasi yang menunjukkan pembagian realitas yang dibuat berdasarkan representasi ideologis tertentu untuk memahami realitas.<sup>26</sup>

Dalam aspek gramatikal, nilai eksperiental ini terkait dengan cara bentuk-bentuk gramatikal bahasa menandai peristiwa atau relasi sosial di dunia ini, orang-orang atau hewan yang terlibat dalam peristiwa tersebut, cara kemunculannya, dan lain-lain. Contoh nilai eksperiental dalam tata bahasa ini bisa dilihat dari tipe kalimat yang digunakan, penggunaan nominalisasi atau sebuah proses yang direduksi menjadi kata benda (*noun*) yang mengindikasikan bahwa ada makna yang hilang atau dihilangkan karena kepentingan ideologis tertentu.<sup>27</sup>

Nilai kedua adalah nilai relasional, yang merupakan jejak tentang relasi sosial yang ditampilkan dalam teks. Nilai ini memfokuskan pada bagaimana pilihan penggunaan kata dalam teks berperan dan berkontribusi pada penciptaan relasi sosial di antara para partisipan. Strategi penghindaran (*avoidance*) biasa digunakan oleh produser teks untuk menghasilkan nilai eksperimental untuk kepentingan relasional. Selain itu, salah satu properti kosakata yang terkait dengan nilai-nilai relasional adalah formalitas. Penggunaan formalitas ini berimplikasi pada tuntutan terciptanya formalitas dalam relasi sosial yang secara tidak langsung mendefinisikan bagaimana relasi-relasi sosial yang seharusnya dibangun.<sup>28</sup>

Dalam aspek gramatikal, nilai relasional ini bisa dilihat dari beberapa poin gramatikal yang digunakan. *Pertama*, bentuk kalimat yang terdiri dari tiga bentuk yaitu deklaratif, pertanyaan gramatikal, dan imperatif. Masing-masing bentuk kalimat memiliki implikasi makna yang berbeda-beda. *Kedua*, modalitas yang terkait dengan otoritas penulis atau pembicara. Modalitas ini mengandung dua dimensi tergantung arah orientasi otoritas tersebut. Modalitas pertama disebut modalitas relasional yang berarti otoritas partisipan dalam relasinya dengan yang lain. Modalitas kedua disebut modalitas ekspresif yang menunjuk pada evaluasi kebenaran dari pembicara atau penulis. *Ketiga*, penggunaan kata ganti (*pronoun*) yang bisa menunjukkan relasi sosial yang dibangun dalam teks.<sup>29</sup>

Nilai ketiga adalah nilai ekspresif yang bermakna jejak tentang evaluasi produser teks tentang realitas yang terkait. Nilai ekspresif ini biasanya berhubungan dengan subjek dan identitas sosial. Dalam aspek kosakata, tiap diskursus yang berbeda memiliki makna signifikan secara ideologis terkait dengan nilai ekspresif yang terdapat dalam kosakata yang digunakan. Skema klasifikasi biasa digunakan oleh pembicara atau penulis untuk mengekspresikan sistem penilaiannya yang secara otomatis mewakili pilihan dan keberpihakan ideologisnya.<sup>30</sup> Adapun dalam aspek gramatikal, nilai ekspresif ini bisa ditelusuri melalui modalitas ekspresif yang digunakan. Penggunaan modalitas yang berbeda menandai penilaian dan evaluasi kebenaran yang berbeda yang diberikan oleh pembicara atau penulis.<sup>31</sup>

Bentuk keempat adalah nilai konektif yang menghubungkan bagian-bagian dalam teks.<sup>32</sup> Selain menghubungkan bagian-bagian internal teks, nilai konektif juga terkait dengan hubungan teks dengan konteks situasional teks tersebut. Dalam lingkup tata bahasa, koneksi internal teks bisa dilihat dari penggunaan konektor (kata penghubung), referensi (kalimat yang dirujuk oleh kalimat setelahnya), dan kohesi di antara kalimat satu dengan kalimat yang lain.<sup>33</sup>

Terkait dengan tiga dimensi dalam analisis diskursus kritisnya, yakni teks, praktik diskursif dan praktik sosio-kultural, Fairclough menawarkan tiga jenis analisis yang berbeda. Dalam wilayah teks, deskripsi digunakan untuk melakukan analisis teks untuk mendapatkan gambaran bagaimana teks dipresentasikan. Pada tahap deskripsi ini, Fairclough juga menekankan pentingnya investigasi terhadap proses produksi teks yang mencakup konteks sosial-kultural yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut.<sup>34</sup>

Adapun jenis analisis kedua yaitu interpretasi yang digunakan untuk menganalisis proses, yakni menginterpretasikan teks itu sendiri dan bagaimana teks dikonsumsi dan diinterpretasikan oleh pembaca. Fairclough menjelaskan prosedur interpretasi yang secara garis besar dibagi dua, yakni interpretasi terhadap teks dan situasi kontekstualnya. Interpretasi terhadap teks dibagi dalam empat level. *Pertama, surface of utterance* (permukaan ungkapan) yang terkait dengan proses di mana penafsir mengubah tanda-tanda dalam teks menjadi kata-kata atau kalimat-kalimat dengan memanfaatkan fonologi, tata bahasa dan kosakata. *Kedua, meaning of utterance* (makna ungkapan) yang berhubungan dengan memberikan makna pada ungkapan-ungkapan dalam teks dengan menggunakan alat semantik dan pragmatik. *Ketiga, local coherence* (koherensi lokal) yang berorientasi menetapkan hubungan-hubungan makna di antara berbagai ungkapan yang pada akhirnya menghasilkan penafsiran yang koheren tentang pasangan atau sekuensinya. Untuk menemukan kohesi lokal ini, penafsir bisa menggunakan pengetahuan bahasa tentang kohesi dan pragmatik. Keempat, *text structure and 'point'* yang terkait dengan koherensi teks secara global. Dengan menggunakan skemata atau representasi dari pola-pola tertentu dari tipe-tipe diskursus yang berbeda, penafsir dapat menentukan tipe diskursus yang sedang dianalisis dan tatanan wacananya. Adapun *'point'* dari teks merupakan ringkasan atau topik dari teks tersebut.<sup>35</sup>

Adapun interpretasi konteks diklasifikasikan dalam dua domain, yakni 1) konteks situasional yang bisa ditelusuri dengan menganalisis tatanan-tatanan sosial yang bersifat institusional dan masyarakat yang melingkupi produksi teks; dan 2) konteks intertekstual yang bisa diketahui melalui sejarah interaksional (*interactional history*) dari berbagai diskursus sehingga bisa dilihat diskursus mana yang berhubungan dengan diskursus dalam teks dan asumsi-asumsinya yang menentukan apa diterima dan mana yang ditolak.<sup>36</sup>

Tahap analisis ketiga setelah interpretasi adalah eksplanasi yang diorientasikan untuk menggambarkan diskursus sebagai bagian dari praktik sosial dan menunjukkan determinasi diskursus terhadap struktur sosial

dan efek reproduktifnya terhadap struktur-struktur tersebut, baik efeknya memapankan ataupun mengubah struktur. Struktur sosial yang menjadi fokus analisis adalah relasi-relasi kekuasaan, Adapun proses-proses dan praktik-praktik sosial yang menjadi fokusnya adalah proses-proses dan praktik-praktik perjuangan sosial. Dengan demikian, eksplanasi merupakan persoalan untuk melihat diskursus sebagai bagian dari pertarungan sosial dalam sebuah matriks relasi-relasi kekuasaan.<sup>37</sup>

Dalam skema tentang eksplanasi ini, Fairclough menekankan dua hal yang harus dianalisis yakni determinan dan efek. Dalam hal ini, yang disebut determinan adalah relasi kekuasaan yang menentukan diskursus dalam proses perjuangan sosial. Adapun efek menunjuk pada efek yang dihasilkan diskursus. Baik determinan maupun efek harus dilihat dalam tiga level organisasi sosialnya, yakni level sosial, institusional dan situasional.<sup>38</sup>

## INTERTEKSTUALITAS DAN INTERDISKURSIFITAS

Konsep ini diintrodusir oleh Julia Kristeva pada tahun 1960-an dan berpengaruh secara signifikan dalam perkembangan bahasa yang menandai hadirnya aliran pos-strukturalis dan pos-modernis yang menentang otonomi teks dan (atau budaya). Dengan menentang proposisi strukturalis yang melihat teks secara rigid dan simpel sebagai relasi struktural antara petanda (*signified*) dan penanda (*signifier*) yang dianggap bersifat statis, tetap dan tidak berubah, intertekstualitas menawarkan pemahaman berbeda tentang teks sebagai hadir dalam ruang dan waktu serta pasti berinteraksi dan berhubungan dengan teks-teks lain.<sup>39</sup>

Meski istilah intertekstualitas diperkenalkan oleh Kristeva, namun konsep serupa juga sudah dikaji oleh M.M. Bakhtin sepanjang karir akademisnya.<sup>40</sup> Dengan menggunakan istilah dialogisme, Bakhtin juga menegaskan ketidakmungkinan teks untuk berdiri sendiri tanpa interaksinya dengan teks-teks lain.<sup>41</sup> Bahkan menurut Paul Ricoeur, intertekstualitas justru yang menempati aspek referensial teks yang dianggap tidak memiliki referensi ketika diskursus mengalami fiksasi dalam bentuk teks. Rangkaian teks-teks yang memiliki kaitan dan dikutip dalam teks tersebut dipandang sebagai '*quasi-world*' yang dengannya referensi dari teks dapat diketahui.<sup>42</sup>

Bagi Fairclough, konsep intertekstualitas penting sebagai mekanisme untuk melihat proses strukturisasi dan restrukturisasi tatanan diskursus.<sup>43</sup> Intertekstualitas juga merupakan hal yang inheren dalam teks. Hal ini seperti dinyatakan Bakhtin, sebagaimana dikutip Fairclough yang menyatakan:

*"Our speech...is filled with others' words, varying degrees of otherness and varying degrees of 'our-ness', varying degrees of awareness and detachment.*

*These words of others carry with them their own expression, their own evaluative tone, which we assimilate, rework, and reaccentuate”.*<sup>44</sup>

Pernyataan Bakhtin ini menegaskan eksistensi teks bersifat dependen dan berkoneksi secara dialogis dan dialektis dengan teks-teks lain. Meski teks-teks yang lain memiliki karakter dan ekspresi masing-masing, namun dalam proses peminjaman dan interaksi, teks-teks tersebut kemudian diasimilasi, diinkorporasikan, atau bahkan diberi penekanan lebih dalam teks yang baru. Dalam konteks inilah, setiap teks atau ucapan tidak pernah merupakan reproduksi teks atau ucapan sebelumnya, tapi selalu teks baru atau ucapan yang baru.

Signifikansi intertekstualitas ini terletak pada potensinya dalam menciptakan perubahan sosial. Julia Kristeva, sebagaimana dikutip Fairclough, menegaskan bahwa intertekstualitas meniscayakan adanya “*the insertion of history (society) into a text and of text into history*”. “*The insertion of history into a text*” bermakna bahwa teks dibentuk dan diciptakan dengan memasukkan teks-teks terdahulu yang dianggap sebagai artefak sejarah. Adapun “*the insertion of text into history*” berarti eksistensi teks yang merespon dan mengaksentuasikan teks-teks yang terdahulu menunjukkan peran teks dalam menciptakan sejarah baru melalui perubahan sosial serta perannya untuk membentuk teks-teks selanjutnya.<sup>45</sup>

Hal ini sekaligus juga menegaskan bahwa konsep intertekstualitas merepresentasikan produktivitas teks untuk mentransformasi teks-teks terdahulu dan merestrukturisasikan konvensi-konvensi yang ada (genre, diskursus) sehingga menghasilkan konvensi yang baru. Namun demikian, produktivitas ini tidak bersifat umum dan bisa diakses oleh semua orang, karena inovasi tekstual ini selalu dibatasi dan dikondisikan oleh relasi-relasi kekuasaan. Oleh karena itu, intertekstualitas selalu berdampingan dengan relasi kuasa, sehingga analisis hubungan intertekstualitas dengan hegemoni menjadi penting. Dalam pertarungan hegemonik selalu ada proses-proses intertekstualitas untuk lebih memapankan diskursus dan relasi kuasa yang ada atau untuk mentransformasikannya.<sup>46</sup> Berbeda dengan kalangan post-strukturalis yang melihat intertekstualitas sebagai ruang instabilitas dan perubahan terus-menerus dalam bahasa, Fairclough seperti dijelaskan di atas justru melihatnya sebagai tanda bagi stabilitas dan instabilitas, kontinuitas dan perubahan.<sup>47</sup>

Secara teknis, ada beberapa ciri penting dalam relasi intertekstual. *Pertama*, relasi antara teks satu dengan teks lain bersifat resiprokal yang berarti bahwa antara teks satu dengan kelompok teks lain saling mempengaruhi makna masing-masing. *Kedua*, kelompok teks atau *genre* menjadi

konteks di mana teks tersebut diproduksi dan diinterpretasikan. *Ketiga*, beberapa konteks dari teks mungkin bertindak sebagai petunjuk-petunjuk metalingual. *Keempat*, teks bisa dibaca secara berbeda atau kontradiktif dengan konteksnya dan dihubungkan dengan serangkaian teks yang lain.<sup>48</sup>

Lebih lanjut, Fairclough melakukan distingsi jenis intertekstualitas. Pertama adalah intertekstualitas manifest yang didefinisikan sebagai adanya kehadiran teks-teks lain yang tampak secara eksplisit dalam teks, seperti dengan kutipan-kutipan. Selain itu, bentuk intertekstualitas pertama ini misalnya berupa representasi diskursus, presuposisi, negasi, metadiskursus dan ironi.<sup>49</sup>

Jenis kedua adalah intertekstualitas konstitutif atau juga disebut interdiskursivitas yang menunjuk pada konfigurasi konvensi-konvensi diskursus yang hadir dalam produksi teks. Beberapa elemen yang termasuk dalam interdiskursivitas, yakni *genre*, tipe aktivitas, *style*, dan wacana.<sup>50</sup> Kedua bentuk intertekstualitas tersebut penting dalam konstruksi analisis diskursus kritis Fairclough untuk mengungkap jaringan relasi teks dan konteks dalam rangka penemuan relasi kuasa yang beroperasi dalam diskursus.

Meski teori intertekstualitas sangat penting, namun eksistensinya harus didukung oleh teori lain karena teori ini tidak dapat menjelaskan relasi kekuasaan yang termanifestasikan dalam determinasi sosial terhadap diskursus. Untuk itu, Fairclough menekankan perlunya mengakomodir teori tentang relasi kuasa untuk melihat bagaimana sebuah diskursus dibentuk dan membentuk struktur dan praktik sosial. Teori hegemoni dipandang penting untuk melihat proses-proses intertekstual di mana perjuangan hegemonik dalam diskursus berlangsung dan mempengaruhi (juga dipengaruhi oleh) perjuangan hegemonik dalam lingkup yang lebih besar.<sup>51</sup>

## **DISKURSUS, IDEOLOGI DAN HEGEMONI**

Ideologi, menurut Fairclough, diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan kekuasaan.<sup>52</sup> Eksistensinya sangat krusial untuk mendukung atau melanggengkan relasi kuasa dalam struktur sosial atau dalam masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan definisi ideologi yang diberikan Fairclough sebagai "*significations/constructions of the reality ... which are built into several various dimensions of the forms/meanings of discursive practices and which contribute to the production, reproduction or transformation of relations of dominations*".<sup>53</sup> Konstruksi makna terhadap realitas melalui bahasa, baik dalam hal pemaknaan tentang dunia, relasi sosial, dan identitas sosial, bersifat ideologis karena berpretensi untuk memapankan relasi dominasi dalam masyarakat.

Pemahaman Fairclough tentang ideologi yang melekat dalam praktik diskursif banyak dipengaruhi oleh pandangan John Thompson yang menganggap ideologi sebagai praktik yang ada dalam setiap proses produksi makna yang diorientasikan untuk mempertahankan relasi kekuasaan.<sup>54</sup> Hal ini juga senada dengan pandangan para intelektual marxis lain, seperti Althusser dan Gramsci, yang memandang signifikansi produksi makna dalam kehidupan sehari-hari dalam keberlangsungan *status quo*. Namun demikian, berbeda dengan Althusser yang menekankan aspek konstitutif ideologi yang menjadikan subjek terinterpelasi<sup>55</sup> dan berada dalam posisi pasif sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan sosial. Fairclough justru menegaskan agensi subjek sehingga muncul transformasi sosial. Pertarungan ideologis menurutnya justru merupakan salah satu dimensi dari praktik diskursif untuk membentuk kembali ideologi-ideologi dan praktik diskursif yang ada dalam rangka restrukturisasi dan transformasi relasi dominasi.<sup>56</sup>

Eksistensi ideologi bersifat laten yang beroperasi di balik diskursus dan praktik diskursif-sosial. Justru karena bersifat laten, ideologi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan membentuk pandangan subjek dalam memaknai realitas serta mengarahkan praktik sosialnya. Lebih jauh, karena melekat dalam praktik diskursif, ideologi bisa menjadi semakin efektif jika keberadaannya dinaturalisasikan sehingga menjadi *common-sense*<sup>57</sup> dan diterima oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Dalam praktik naturalisasi setidaknya ada dua elemen yang dilibatkan. *Pertama*, adanya elemen yang disebut Pierre Bourdieu sebagai *'the misrecognition of arbitrariness'* yang menjadikan sistem makna terlihat transparan. Artinya, transparansi bahasa muncul sehingga bahasa dianggap menampilkan realitas apa adanya. *Kedua*, sistem makna selalu didukung oleh kekuasaan yang melegitimasi seperti kekuasaan para ahli atau saintis dan kekuasaan para intelegensia.<sup>58</sup>

Efek ideologisnya, publik tidak menyadari adanya ideologi yang diinvestasikan melalui bahasa dan mendasari praktik diskursif tertentu. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa ideologi bersifat statis dan tidak berubah, karena Fairclough menjadikan perjuangan ideologis sebagai salah satu dimensi dalam praktik diskursif untuk membentuk kembali praktik diskursif dan ideologi yang mendasarinya dalam konteks transformasi relasi dominasi.<sup>59</sup>

Kontestasi ideologi dalam ruang sosial diperkuat dengan adopsi Fairclough terhadap konsep hegemoni yang dikembangkan Antonio Gramsci. Berpijak pada pandangan bahwa *'common-sense'* memuat beberapa unsur

yang saling berkompetisi dalam ruang negosiasi makna,<sup>60</sup> hegemoni kemudian dimaknai sebagai kekuasaan atas masyarakat yang dibangun melalui aliansi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang lain yang menciptakan ekuilibrium yang tidak stabil.<sup>61</sup> Hegemoni tidak hanya bermakna sebagai dominasi tapi juga ruang negosiasi makna dari berbagai kekuatan sosial yang berpartisipasi dalam pertarungan hegemonik, pertarungan untuk mendapatkan penerimaan publik.

## **KESIMPULAN**

Kajian tentang wacana dalam berbagai disiplin menghasilkan beragam teoretisasi wacana sesuai dengan perspektif masing-masing dan seringkali bersifat parsial. Disiplin linguistik, misalnya, hanya mengkaji diskursus atau wacana dari aspek linguistiknya saja. Adapun sarjana ilmu sosial lebih menekankan pada peran diskursus dalam konstitusi sosial yang melekat di dalamnya relasi kuasa dan kurang memberikan perhatian pada aspek linguistik. Di samping itu, linguistik kritis mencoba menggabungkan antara tradisi linguistik dan sosial, namun mereka masih terjebak dalam melihat teks semata-mata sebagai sebuah produk dan mengabaikan aspek produktif dan interpretatif dari teks.

Berbasis pada parsialitas kajian-kajian diskursus yang ada, Norman Fairclough berupaya menteoretisasikan konsep wacana yang berupaya menggabungkan beberapa tradisi, yakni linguistik, tradisi interpretatif, dan sosiologi. Dalam teorinya, Fairclough menawarkan model diskursus yang memuat tiga dimensi, yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Masing-masing dimensi ini memiliki wilayah dan proses masing-masing dan ketiganya berhubungan secara dialektis. Dimensi pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi. Yang kedua adalah praktik diskursif yang terkait dengan interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Dimensi ketiga adalah praktik sosial atau konteks yang mencakup praktik-praktik sosio-kultural di mana proses produksi dan interpretasi itu berlangsung. Ketiga dimensi ini kemudian dianalisis dengan tiga model analisis yang berbeda. Deskripsi digunakan untuk menganalisis teks. Interpretasi digunakan untuk menganalisis proses produksi dan interpretasi teks. Adapun eksplanasi dipakai untuk menganalisis praktik-praktik sosio-kultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial.

Konsep penting yang lain dari Fairclough adalah intertekstualitas yang mengafirmasi interrelasi berbagai teks dan diskursus dalam sebuah teks. Ini menunjukkan adanya efek sirkumstansial di mana produksi teks

disituasikan dan dipengaruhi oleh teks-teks atau diskursus-diskursus yang lalu atau yang kontemporer. Konsep ini juga akan menghasilkan efek ideologis berupa strukturasi dan restrukturasi tatanan diskursus yang ada. Ketika kekuasaan dan ideologi melekat dalam diskursus, maka intertekstualitas bertindak sebagai mekanisme untuk menjaga atau mengubah relasi dominasi.

Relasi ideologi dan diskursus juga menjadi poin penting dalam teoretisasi Fairclough. Terinspirasi dari Foucault, Gramsci, Althusser, dan Bourdieu, dia menegaskan bahwa ideologi melekat dalam diskursus dan praktik-praktik diskursif yang seringkali berlangsung secara halus dan tidak disadari sehingga subjek menganggapnya sebagai natural dan benar. Melalui mekanisme naturalisasi, ideologi membatasi praktik-praktik kognitif maupun sosial dari individu dan masyarakat. Meski demikian, tidak berarti bahwa subjek kehilangan agensinya karena mereka juga memiliki kapasitas reflektif kritis untuk mempersoalkan praktik-praktik diskursif dan ideologinya. Ini sesuai dengan konsep hegemoni yang menunjuk pada kontestasi ideologis di antara berbagai kelompok untuk menegosiasikan dan menunjukkan kekuasaannya untuk mendapatkan penerimaan publik dan kekuasaan hegemonis.

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Sara Mills, *Discourse* (New York & London: Routledge, 2001), hlm. 6.

<sup>2</sup> F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 249.

<sup>3</sup> Stuart Hall, "Introduction", dalam Stuart Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (London: The Open University, 1997), hlm. 35.

<sup>4</sup> Stephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication* (California: Wadsworth Publishing Company, 1992), hlm. 190.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

<sup>6</sup> Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis as Theory and Method* (Los Angeles: Sage, 2002), hlm. 5-6.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 62-63.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>11</sup> Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language* (London dan New York: Longman, 1995).

<sup>12</sup> Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis*, hlm. 63-64.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>15</sup> Norman Fairclough, *Language and Power* (England: Pearson Educated Limited,

2001), hlm. 31.

<sup>16</sup> Chris Weedon, *Feminist Practice and Poststructuralist Theory* (Monash: Monash University Press, 1998), hlm. 108.

<sup>17</sup> Judith Butler, *Undoing Gender* (New York & London: Routledge, 2004), hlm. 41

<sup>18</sup> Judith Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (London and New York, Routledge, 1999), hlm. 4.

<sup>19</sup> Norman Fairclough, *Language and Power*, hlm. 20

<sup>20</sup> Edward W. Said, *The World, the Text and the Critic* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1983), hlm. 35.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>23</sup> Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis*, hlm. 65-66.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>25</sup> Norman Fairclough, *Language and Power*, hlm. 94.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 104-103.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 97-98.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 108-109.

<sup>34</sup> Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis*, hlm. 97-100.

<sup>35</sup> Norman Fairclough, *Language and Power*, hlm. 119-120.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 136-137.

<sup>39</sup> Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 432. Tony Thwaites, dan Warwick Mules, *Introducing Cultural and Media Studies* (Australia, Palgrave, 2002), hlm. 96-97.

<sup>40</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 101.

<sup>41</sup> M.M. Bakhtin, *Speech Genres and Other Late Essays* (Austin: University of Texas Press, 1986), hlm. 106.

<sup>42</sup> Edward W. Said, *The World, the Text*, hlm. 5.

<sup>43</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, hlm. 101.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>47</sup> Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis*, hlm. 74.

<sup>48</sup> Tony Thwaites, dan Warwick Mules, *Introducing Cultural*, hlm. 98.

<sup>49</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, hlm. 118-123.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 103-104.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>52</sup> Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis*, hlm. 75.

<sup>53</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, hlm. 87.

<sup>54</sup> Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis*, hlm. 75.

<sup>55</sup> Louis Althusser memaknai interpelasi sebagai alat di mana ideologi “*recruits subjects among the individuals dan transforms individuals into subjects*”. Proses ini menghasilkan tidak hanya pengakuan subjek saja tapi juga praktik sosialnya yang akan disesuaikan dengan apa yang didefinisikan oleh aparatus ideologis tersebut. Louis Althusser, *Essays on Ideology* (London & New York: Verso, 1993), hlm. 45-49.

<sup>56</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, hlm. 87-88.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>58</sup> Norman Fairclough, *Language and Power*, hlm. 79.

<sup>59</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, hlm. 88.

<sup>60</sup> Marianne Jorgensen dan Louise Phillips, *Discourse Analysis*, hlm. 76.

<sup>61</sup> Norman Fairclough, *Discourse and Social Change*, hlm. 92.

## DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis. 1993. *Essays on Ideology*. London & New York: Verso.
- Bakhtin, M.M. 1986. *Speech Genres and Other Late Essays*. Austin: University of Texas Press.
- Butler, Judith. 1999. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. London and New York: Routledge.
- . 2004. *Undoing Gender*. New York & London: Routledge.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- . 1995. *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. London dan New York: Longman.
- . 2001. *Language and Power*. England: Pearson Educated Limited.
- Hall, Stuart. 1997. “Introduction”, in Stuart Hall (ed.). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: The Open University.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jorgensen, Marianne and Phillips, Louise. 2002. *Discourse Analysis as Theory and Method*. Los Angeles: Sage.
- Littlejohn, Stephen W. 1992. *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Mills, Sara. 2001. *Discourse*. New York & London: Routledge.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Said, Edward W. 1983. *The World, the Text and the Critic*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Thwaites, Tony and Mules, Warwick. 2002. *Introducing Cultural and Media Studies*. Australia: Palgrave.
- Weedon, Chris. 1998. *Feminist Practice and Theory*. Monash: Monash University Press.